

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan
Kebijakan
Teknis
Inspektorat
Jenderal
Kementerian
Pertanian

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS INSPEKTORAT

JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan bebas dari KKN pada Kementerian Pertanian melalui pengawasan yang efektif dan akuntabel. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan Jakarta Selatan memiliki pegawai sebanyak 285 orang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan di Intern dilingkungan Kementerian Pertanian. Adapun fungsi Inspektorat Jenderal yaitu: (1) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; (2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; (3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; (4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; (5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Dan perannya sebagai *Quality Assurance dan Advisory Services* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Melalui kebijakan pengawasan yang lebih bersifat preventif, dan pre-emptif adanya kesalahan maupun terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Melalui peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai dengan Permentan No. 40 Tahun 2020 terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV dan Inspektorat Investigasi.

A. 1.1 VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL

1. VISI

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian selama lima tahun serta sebagai suatu tujuan atau cita-cita bersama di masa yang akan datang, Inspektorat Jenderal menetapkan visi yaitu ***"Menjadi Mitra Miyatani dalam mengawal Pengelola Program Pembangunan Pertanian dan Pangan yang Maju, Mandiri dan Modern menuju Petani Sejahtera"***.

2. Arah Pengawasan

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengemban upaya-upaya arah pengawasan yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.
- b. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.
- c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

A.1.2. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan arah pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan berupa terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Pertanian. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan cara :

1. Memastikan pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan;

2. Memberi peringatan dini, meningkatkan efektivitas dan pengendalian intern, serta manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian;
3. Memastikan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian dilaksanakan dengan benar oleh seluruh unit kerja dilingkungan Kementerian Pertanian; dan
4. Mewujudkan organisasi Itjentan yang modern dilandasi internalisasi pelaksanaan nilai-nilai dasar: integritas, inovatif, professional dan kredibilitas.

A.1.3. SASARAN

Berdasarkan visi, misi dan tujuan diatas, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pengawasan intern sebagai berikut :

1. Mewujudkan lembaga pengawas intern yang unggul;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian
3. Meningkatkan Maturitas SPI di Kementerian Pertanian;
4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan pertanian dan pangan;
5. Meningkatkan kualitas pengawasan internal;
6. Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Inspektorat Jenderal;
7. Mewujudkan tata kelola anggaran Inspektorat Jenderal yang efisien dan akuntabel.

A.1.3. CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat

diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan.

Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terdapat 2 jenis kegiatan yaitu Kegiatan Strategis dan Kegiatan Penunjang. Per 31 Desember 2021 Progres pencapaian output seluruh kegiatan dan layanan telah terealisasi persen. (rincian Output Kegiatan dapat dilihat pada lampiran A.1).

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2.PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Itjentan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Instansi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah Sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Auited Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2021 ini merupakan laporan konsolidasi dari satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, yang secara struktural berada di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Jumlah satuan kerja di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah

satu satuan kerja yaitu satker Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Inspektorat Jenderal menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat peristiwa dan transaksi itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip,

dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pendapatan LO pada Inspektorat Jenderal adalah Pendapatan Denda dan Pendapatan lainnya.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan First In First Out (FIFO) sebagaimana kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Penerapan Metode First In First Out (FIFO), bahwa mulai tahun 2021 metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode FIFO.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya

sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai yang tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman pada KMK No.620/KM.6/2015 tentang masa manfaat dalam rangka Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud (ATB) pada entitas Pemerintah Pusat .
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos- pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun- akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Negara dan

Hibah

Rp146.470.755,

00

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode 31 Desember 2021 adalah senilai Rp146.470.755,00 atau mencapai 976,47 persen (pembulatan 976 persen) dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp15.000.000,00. Pendapatan Negara dan Hibah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian merupakan Pendapatan Lain-lain.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tidak memiliki potensi PNBP, sehingga estimasi pendapatan tahun 2021 hanya ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00. Dan adanya pandemi COVID-19 tidak berdampak pada Pendapatan PNBP Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel B.1.1

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2021

Akun	Uraian	Estimasi	Pendapatan	Pengembalian	Pendapatan	%
		Pendapatan	Bruto		Netto	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
4259	Pendapatan lain-lain	15.000.000	146.470.755	-	146.470.755	976,47
Total		15.000.000	146.470.755	-	146.470.755	976,47

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan senilai Rp62.500.786,00 atau 74,43 persen jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021.

Tabel B.1.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	31 Desember 2021			31 Desember 2020			Kenaikan /	
	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Pendapatan dari Pejualan Peratan dan Mesin	119.309.445	-	119.309.445	14.000.000	-	14.000.000	105.309.445	752,21
Pendapatan dari Penutupan rekening	-	-	-	1.128.322	-	1.128.322	(1.128.322)	(100,00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-	587.510	-	587.510	(587.510)	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	24.737.510	-	24.737.510	3.693.572	-	3.693.572	21.043.938	569,74
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	2.423.800	-	2.423.800	64.560.457	-	64.560.457	(62.136.657)	(96,25)
-Pendapatan Anggaran Lain lain	-	-	-	108	-	108	(108)	(100,00)
Jumlah Pendapatan	146.470.755	-	146.470.755	83.969.969	-	83.969.969	62.500.786	74,43

Kenaikan Realisasi PNBPN pada Tahun 2021 yang paling signifikan adalah karena adanya pendapatan dari lelang 4 unit kendaraan operasional Itjen Kementan senilai Rp119.309.445,00, namun terdapat juga penurunan pendapatan yang cukup signifikan pada penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu (TAYL) karena menurunnya setoran pengembalian sisa LS perjalanan dinas tahun 2020.

Realisasi PNBPN per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp146.470.755,00 dan data pada aplikasi Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) adalah senilai Rp26.605.800,00, sehingga terdapat selisih lebih besar pada Realisasi PNBPN senilai Rp119.864.955,00. Hal ini karena penyetoran pendapatan lelang kendaraan operasional Itjentan disetor melalui KPPN Jakarta II senilai Rp119.309.445,00; pengembalian tunjangan struktural tahun lalu senilai Rp185.510,00; dan pengembalian gaji pensiunan Itjentan bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 senilai Rp370.000,00. (Perbandingan Realisasi Pendapatan (LRA) dan Aplikasi SIMPONI dapat dilihat pada lampiran pendukung B.2.).

Realisasi

Belanja Negara

Rp87.992.269.5

67,00

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (netto) per 31 Desember 2021 senilai Rp87.992.269.567,00 atau 95,92 persen (pembulatan 96 persen) dari anggaran senilai Rp91.732.138.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja senilai Rp649.754.947,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

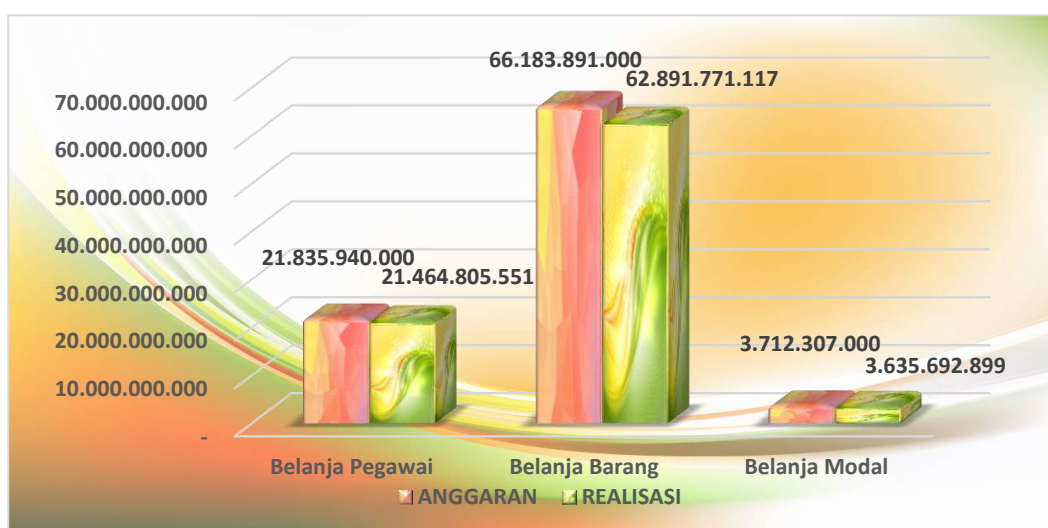
Tabel B.2.1.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	21.835.940.000	21.514.134.039	49.328.488	21.464.805.551	98
52	Belanja Barang	66.183.891.000	63.589.843.404	698.072.287	62.891.771.117	95
53	Belanja Modal	3.712.307.000	3.635.692.899	-	3.635.692.899	98
Total Belanja		91.732.138.000	88.739.670.342	747.400.775	87.992.269.567	96

Grafik B.2

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2021



Selama periode berjalan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 7 kali dari DIPA. Anggaran Inspektorat Jenderal semula sebesar Rp164.581.831.000,00 direvisi menjadi sebesar Rp91.732.138.000,00. Sehingga pagu Anggaran terlihat sebagai berikut ini.

Tabel B.2.2
Anggaran Awal dan Revisi Anggaran
Per 31 Desember 2021

Uraian	Tahun 2021		Selisih
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	
Pendapatan Lain-lain	15.000.000	15.000.000	-
Jumlah Pendapatan	15.000.000	15.000.000	-
Belanja			
Belanja Pegawai	23.742.100.000	21.835.940.000	1.906.160.000
Belanja Barang	129.586.731.000	66.183.891.000	63.402.840.000
Belanja Modal	11.253.000.000	3.712.307.000	7.540.693.000
Jumlah Belanja	164.581.831.000	91.732.138.000	72.849.693.000

Pada awal tahun anggaran 2021, Inspektorat Jenderal Kementan mendapat alokasi anggaran senilai Rp164.581.831.000,00, dan mendapat penghematan belanja senilai Rp72.849.693.000,00 sehingga anggaran belanja ltjen menjadi senilai Rp91.732.138.000,00.

Terdapat revisi anggaran pada Belanja Pegawai - akun Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS yang semula senilai Rp681.135.000,00 menjadi Rp52.395.000,00. Revisi anggaran tersebut disebabkan adanya salah penetapan akun yang semula 511511 (Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS), direvisi menjadi 002 – Operasional dan Pemeliharaan Kantor - 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) senilai Rp628.740.000,00.

Belanja Barang semula senilai Rp129.586.731.000,00 menjadi senilai Rp66.183.891.000,00. Perubahan alokasi Belanja Barang karena adanya realokasi dan refocusing anggaran serta pergeseran dari Belanja Pegawai ke Belanja Barang senilai Rp628.740.000,00. Selain adanya pergeseran dari Belanja Pegawai ke Belanja Barang senilai Rp628.740.000,00, terdapat pula penghematan belanja senilai Rp63.402.840.000,00.

Belanja modal semula Rp11.253.000.000,00 dilakukan penghematan sebesar Rp7.540.693.000,00.

Total anggaran 2021 setelah revisi senilai Rp91.732.138.000,00 dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 senilai Rp3.088.398.000,00 atau 3,67 persen dari total anggaran.

Tabel B.2.3
Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan
Per 31 Desember 2021

Uraian Program	Uraian Kegiatan	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian Belanja (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Itjentan	45.498.942.000	43.140.058.016	190.567.002	42.949.491.014	94,40
	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian	46.233.196.000	45.599.612.326	556.833.773	45.042.778.553	97,43
Total Realisasi Belanja		91.732.138.000	88.739.670.342	747.400.775	87.992.269.567	95,92

Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel B.2.4
Perbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

KODE	URAIAN	Anggaran 2021	Realisasi Netto 31-Dec-21	%	Anggaran 2020	Realisasi Netto 31-Dec-20	%	Kenaikan / Penurunan	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	21.835.940.000	21.464.805.551	98,30	24.492.100.000	22.142.340.438	90,41	(677.534.887)	7,89
52	Belanja Barang	66.183.891.000	62.891.771.117	95,03	51.205.231.000	50.195.960.196	98,03	12.695.810.921	(3,00)
53	Belanja Modal	3.712.307.000	3.635.692.899	97,94	3.884.500.000	3.833.575.991	98,69	(197.883.092)	(0,75)
Jumlah		91.732.138.000	87.992.269.567	95,92	79.581.831.000	76.171.876.625	95,72	11.820.392.942	0,21

Realisasi Belanja (Netto) yang berakhir 31 Desember 2021 mengalami kenaikan senilai Rp11.820.392.942,00 atau 0,21 persen dibandingkan realisasi per 31 Desember 2020, karena adanya penambahan Pagu Anggaran Tahun 2021. Namun secara prosentase realisasi belanja barang dan belanja modal tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan anggaran untuk Inspektur Jenderal melalui Inspeksi Pimpinan tidak dapat sepenuhnya direalisasikan, karena Inspektur

Jenderal definitif tidak ada begitu juga pada kegiatan Pelaksanaan Audit Investigasi dan Audit Tujuan tertentu pada Inspektorat Investigasi yang tidak sepenuhnya dapat direalisasikan.

Belanja Pegawai
Rp21.464.805.5
51,00

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai (netto) adalah Realisasi Belanja Pegawai per tanggal laporan setelah dikurangi pengembalian belanja pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai (netto) per 31 Desember 2021 senilai Rp21.464.805.551,00 atau sebesar 98,30 persen dari Pagu Anggaran senilai Rp21.835.940.000,00 setelah dikurangi pengembalian realisasi belanja senilai Rp49.328.488,00.

Tabel B.3.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Sub Kelompok Belanja per 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Belanja Gaji Pokok PNS	15.068.433.000	15.063.458.660	16.027.824	15.047.430.836	99,86
Belanja Pembulatan Gaji PNS	330.000	214.030	2.714	211.316	64,04
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.106.560.000	1.105.175.012	-	1.105.175.012	99,87
Belanja Tunjangan anak PNS	305.963.000	305.839.900	-	305.839.900	99,96
Belanja Tunjangan Struktural PNS	338.220.000	337.220.000	21.425.200	315.794.800	93,37
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.284.770.000	2.284.770.000	10.585.650	2.274.184.350	99,54
Belanja Tunjangan PPH PNS	138.159.000	137.267.217	-	137.267.217	99,35
Belanja Tunjangan Beras PNS	800.300.000	799.589.220	362.100	799.227.120	99,87
Belanja Uang Makan PNS	1.493.300.000	1.189.682.000	-	1.189.682.000	79,67
Belanja Tunjangan Umum PNS	213.685.000	213.445.000	925.000	212.520.000	99,45
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	52.395.000	52.395.000	-	52.395.000	100,00
Belanja Uang Lembur	33.825.000	25.078.000	-	25.078.000	74,14
Jumlah Belanja Pegawai	21.835.940.000	21.514.134.039	49.328.488	21.464.805.551	98,30

Pengembalian Belanja senilai Rp49.328.488,00 merupakan pengembalian belanja pegawai tahun berjalan yang disebabkan diantaranya.

- Pengembalian gaji pokok dan THR, Jabatan Tunjangan Umum, Tunjangan Beras dan nilai pembulatannya pada pensiunan Itjentan dari bulan Januari sampai dengan April 2021;

- Pengembalian Tunjangan Jabatan Struktural bulan Januari 2021 dari pegawai Itjentan yang pindah ke Sekretariat Jenderal Kementan;
- Pengembalian Tunjangan Jabatan Struktural pegawai Itjentan karena peralihan jabatan ke Fungsional;
- Pengembalian Tunjangan Jabatan Fungsional pada Kasubag TU Inspektorat
- Pengembalian Tunjangan Fungsional Auditor

Realisasi Belanja Pegawai (netto) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing senilai Rp21.464.805.551,00 dan Rp22.142.340.438,00.

Tabel B.3.2

Perbandingan Belanja Pegawai

Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	31-Dec-21			31-Dec-20			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran	Realisasi (Bruto)	%	Anggaran	Realisasi (Bruto)	%	(Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)			
Belanja Gaji Pokok PNS	15.068.433.000	15.063.458.660	99,97	16.896.160.000	15.068.647.920	89,18	(5.189.260)	10,78
Belanja Pembulatan Gaji PNS	330.000	214.030	64,86	330.000	196.547	59,56	17.483	5,30
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.106.560.000	1.105.175.012	99,87	1.220.000.000	1.108.880.806	90,89	(3.705.794)	8,98
Belanja Tunjangan anak PNS	305.963.000	305.839.900	99,96	375.000.000	310.479.940	82,79	(4.640.040)	17,17
Belanja Tunjangan Struktural PNS	338.220.000	337.220.000	99,70	518.840.000	440.570.000	84,91	(103.350.000)	14,79
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.284.770.000	2.284.770.000	100,00	1.938.803.000	1.929.700.000	99,53	355.070.000	0,47
Belanja Tunjangan PPH PNS	138.158.000	137.267.217	99,35	140.145.000	118.353.183	84,45	18.914.034	14,90
Belanja Tunjangan Beras PNS	800.300.000	799.589.220	99,91	748.960.000	697.911.540	93,18	101.677.680	6,73
Belanja Uang Makan PNS	1.493.300.000	1.189.682.000	79,67	1.501.300.000	1.500.477.000	99,95	(310.795.000)	(20,28)
Belanja Tunjangan Umum PNS	213.685.000	213.445.000	99,89	332.035.000	287.780.000	86,67	(74.335.000)	13,22
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	52.395.000	52.395.000	100,00	681.135.000	681.135.000	100,00	(628.740.000)	-
Belanja Uang Lembur	33.825.000	25.078.000	74,14	139.392.000	16.419.000	11,78	8.659.000	62,36
Jumlah Belanja Pegawai (Bruto)	21.835.940.000	21.514.134.039	98,53	24.492.100.000	22.160.550.936	90,48	(646.416.897)	8,05
Pengembalian Belanja	-	49.328.488	-	-	18.210.498	-	31.117.990	-
Jumlah Belanja Pegawai (Netto)	21.835.940.000	21.464.805.551	98,30	24.492.100.000	22.142.340.438	90,41	(677.534.887)	7,89

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp677.534.887,00 dibandingkan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2020. Penurunan yang signifikan disebabkan adanya revisi pada akun belanja gaji pokok pegawai non PNS yang belum direalisasikan senilai Rp628.740.000,00 ke akun belanja keperluan kantor sesuai dengan rekomendasi BPK RI. Namun secara persentase mengalami kenaikan sebesar 7,89 persen karena pagu pada tahun 2021 menurun dari pada tahun 2020, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 tidak

adanya Inspektur Jenderal definitif, adanya 7 pegawai Inspektorat Jenderal yang pensiun dan 3 meninggal.

Belanja Barang
Rp62.891.771.1
17,00

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Barang pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja barang.

Realisasi Belanja Barang (*Netto*) per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp62.891.771.117,00 atau 95,03 persen (pembulatan 95 persen) dari Pagu Anggaran senilai Rp66.183.891.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja barang senilai Rp698.072.287,00.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Sub kelompok Belanja disampaikan sebagai berikut.

Tabel B.4.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Sub Kelompok Belanja per 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Belanja Keperluan Perkantoran	1.260.210.000	1.196.398.597	-	1.196.398.597	94,94
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	216.000.000	92.490.000	-	92.490.000	42,82
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	460.580.000	460.572.000	-	460.572.000	100,00
Belanja Barang Operasional Lainnya	60.280.000	49.397.100	-	49.397.100	81,95
Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID 19	601.402.000	600.473.792	-	600.473.792	99,85
Belanja Bahan	993.934.000	882.666.590	-	882.666.590	88,81
Belanja Honor Output Kegiatan	60.450.000	58.950.000	-	58.950.000	97,52
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.441.183.000	2.343.278.459	-	2.343.278.459	95,99
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.490.049.000	1.487.702.716	-	1.487.702.716	99,84
Belanja Langganan Telepon	18.480.000	9.765.777	-	9.765.777	52,85
Belanja Sewa	257.385.000	203.098.000	-	203.098.000	78,91
Belanja Jasa Profesi	739.600.000	546.200.000	745.000	545.455.000	73,75
Belanja Jasa Lainnya	245.258.000	239.310.287	-	239.310.287	97,57
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.486.996.000	2.340.415.876	1.670.122	2.338.745.754	94,04
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	525.529.000	360.025.133	-	360.025.133	68,51
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.930.530.000	1.769.918.887	-	1.769.918.887	91,68
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	232.000.000	210.108.400	-	210.108.400	90,56
Belanja Perjalanan Biasa	40.708.460.000	40.067.390.110	609.047.235	39.458.342.875	96,93
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	583.950.000	458.970.000	9.260.000	449.710.000	77,01
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	69.160.000	41.606.000	280.000	41.326.000	59,75
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.802.455.000	10.171.105.680	77.069.930	10.094.035.750	93,44
Jumlah Belanja Barang	66.183.891.000	63.589.843.404	698.072.287	62.891.771.117	95,03

Pengembalian belanja barang senilai Rp698.072.287,00 adalah pengembalian belanja barang berupa pengembalian biaya SWAB PCR Inspektorat Investigasi dan Sekretariat senilai Rp1.670.122,00 dan pengembalian belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri selama tahun berjalan senilai Rp696.465.165,00.

Realisasi Belanja Barang (*Netto*) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp62.891.771.117,00 dan Rp50.195.960.196,00.

Tabel B.4.2
Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	31-Dec-21			31-Dec-20			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
Belanja Keperluan Perkantoran	1.260.210.000	1.196.398.597	94,94	409.377.000	409.084.790	99,93	787.313.807	(4,99)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	216.000.000	92.490.000	42,82	208.755.000	191.946.000	91,95	(99.456.000)	(49,13)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	460.580.000	460.572.000	100,00	541.200.000	532.091.000	98,32	(71.519.000)	1,68
Belanja Barang Operasional Lainnya	60.280.000	49.397.100	81,95	43.160.000	37.590.700	87,10	11.806.400	(5,15)
Belanja Barang Operasional - Penanganan COVID-19	601.402.000	600.473.792	-	1.020.562.000	1.016.411.172	99,59	(415.937.380)	(99,59)
Belanja Bahan	993.934.000	882.666.590	88,81	881.771.000	873.781.484	99,09	8.885.106	(10,29)
Belanja Honor Output Kegiatan	60.450.000	58.950.000	97,52	175.200.000	140.915.000	80,43	(81.965.000)	17,09
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.441.183.000	2.343.278.459	95,99	797.786.000	770.694.600	96,60	1.572.583.859	(0,61)
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	651.637.000	625.411.110	-	(625.411.110)	-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.490.049.000	1.487.702.716	99,84	1.239.712.000	1.238.768.590	99,92	248.934.126	(0,08)
Belanja Langganan Telepon	18.480.000	9.765.777	52,85	21.000.000	13.880.200	66,10	(4.114.423)	(13,25)
Belanja Sewa	257.385.000	203.098.000	78,91	46.350.000	46.300.000	99,89	156.798.000	(20,98)
Belanja Jasa Profesi	739.600.000	546.200.000	73,85	2.264.900.000	2.208.965.000	97,53	(1.662.765.000)	(23,68)
Belanja Jasa Lainnya	245.258.000	239.310.287	-	-	-	-	-	-
Belanja Jasa -Penanganan Pandemi COVID-19	2.486.996.000	2.340.415.876	94,11	1.290.363.000	1.274.081.250	-	1.066.334.626	94,11
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	525.529.000	360.025.133	68,51	197.930.000	195.420.930	98,73	164.604.203	(30,23)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.930.530.000	1.769.918.887	91,68	1.887.922.000	1.873.075.654	99,21	(103.156.767)	(7,53)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	232.000.000	210.108.400	90,56	112.393.000	111.863.000	99,53	98.245.400	(8,96)
Belanja Perjalanan Biasa	40.708.460.000	40.067.390.110	98,43	29.245.269.000	29.213.875.315	99,89	10.853.514.795	(1,47)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	583.950.000	458.970.000	78,60	384.000.000	360.450.000	93,87	98.520.000	(15,27)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	69.160.000	41.606.000	60,16	1.180.205.000	1.149.034.500	97,36	(1.107.428.500)	(37,20)
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	792.300.000	790.800.000	-	(790.800.000)	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.802.455.000	10.171.105.680	94,16	7.813.439.000	7.753.064.350	99,23	2.418.041.330	(5,07)
Jumlah Belanja Barang (Bruto)	66.183.891.000	63.589.843.404	96,08	51.205.231.000	50.827.504.645	99,26	12.523.028.472	(3,18)
Pengembalian Belanja	-	698.072.287	-	-	631.544.449	-	66.527.838	-
Jumlah Belanja Barang (Netto)	66.183.891.000	62.891.771.117	95,03	51.205.231.000	50.195.960.196	98,03	12.695.810.921	(3,00)

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp12.695.810.921,00 dibandingkan realisasi belanja barang per 31 Desember 2020. Hal ini karena adanya kenaikan nilai pagu anggaran 2021 dibandingkan anggaran tahun 2020, sehingga berpengaruh terhadap kenaikan. Namun secara persentase menurun sebesar 3,00 persen dikarenakan Inspektur Jenderal melalui Inspeksi Pimpinan tidak dapat sepenuhnya direalisasikan, karena Inspektur Jenderal definitif tidak ada begitu juga pada kegiatan Pelaksanaan Audit Investigasi dan Audit Tujuan tertentu pada Inspektorat Investigasi yang tidak sepenuhnya dapat direalisasikan.

Karena masih tingginya kasus pandemi Covid-19 pada tahun 2021 maka anggaran belanja untuk penanganan Pandemi Covid-19 masih diadakan. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengalokasikan belanja barang untuk penanganan Pandemi COVID-19 senilai Rp3.088.398,00. Anggaran tersebut telah terserap senilai Rp2.939.219.546,00 atau 95,22 persen dari nilai anggaran.

Belanja Jasa - Penanganan Covid-19 dibelanjakan untuk pengadaan masker, handsanitizer, vitamin dan obat-obatan untuk pegawai, fasilitasi isolasi dan fisioterapi/obat-obatan kepada pegawai yang terkena Covid-19, biaya test swab, tes rapid antigen serta penyemprotan desinfektan pada Gedung B (Itjentan) serta rumah pegawai yang terpapar virus Covid-19. Untuk lebih jelasnya rincian Belanja Barang untuk penanganan Covid-19 dapat dilihat pada Lampiran pendukung.

Belanja Modal
Rp3.635.692.89
9,00

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Modal pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Modal.

Realisasi Belanja Modal (*Netto*) per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp3.635.692.899,00 atau 97,94 persen (pembulatan 98 persen) dari Pagu Anggaran senilai Rp3.712.307.000,00.

Tabel B.5.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Sub Kelompok Belanja per 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.823.107.000	1.799.142.867	-	1.799.142.867	98,69
Belanja Modal Lainnya	1.457.200.000	1.440.320.178	-	1.440.320.178	98,84
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	432.000.000	396.229.854	-	396.229.854	91,72
Jumlah Belanja Modal	3.712.307.000	3.635.692.899	0	3.635.692.899	97,94

Realisasi Belanja Modal (*Netto*) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.635.692.899,00 dan Rp3.833.575.991,00. Dan tidak terdapat pengembalian belanja modal pada tahun berjalan.

Tabel B.5.2

Perbandingan Belanja Modal

Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	31-Dec-21			31-Dec-20			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	(Rp)	%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.823.107.000	1.799.142.867	98,69	3.669.500.000	3.663.069.391	99,82	(1.863.926.524)
Belanja Modal Lainnya	1.457.200.000	1.440.320.178	98,84	115.000.000	83.930.000	72,98	1.356.390.178	25,86
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	432.000.000	396.229.854	91,72	100.000.000	86.576.600	86,58	309.653.254	5,14
Jumlah Belanja Modal (Bruto)	3.712.307.000	3.635.692.899	97,94	3.884.500.000	3.833.575.991	98,69	(197.883.092)	(0,75)
Pengembalian Belanja	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal (Netto)	3.712.307.000	3.635.692.899	97,94	3.884.500.000	3.833.575.991	98,69	(197.883.092)	(0,75)

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp197.883.092,00 atau 0,75 persen dibandingkan realisasi belanja barang per 31 Desember 2020 hal ini dikarenakan pada saat pengadaan barang/jasa, Itjen mendapatkan harga yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas.

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp1.799.142.867,00

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*Netto*) per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp1.799.142.867,00 atau sebesar 98,69 persen dari Pagu Anggaran senilai Rp1.823.107.000,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*Netto*) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.799.142.867,00 dan Rp3.663.069.391,00.

Tabel B.5.1.1
Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	31-Dec-21			31-Dec-20			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	(Rp)	%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.823.107.000	1.799.142.867	98,69	3.669.500.000	3.663.069.391	99,82	(1.863.926.524)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Bruto)	1.823.107.000	1.799.142.867	98,69	3.669.500.000	3.663.069.391	99,82	(1.863.926.524)	(1,14)
Pengembalian Belanja	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin (<i>Netto</i>)	1.823.107.000	1.799.142.867	98,69	3.669.500.000	3.663.069.391	99,82	(1.863.926.524)	(1,14)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.863.926.524,00 atau 1,14 persen dibandingkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 karena pada saat pengadaan barang/jasa, Itjen mendapatkan harga yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas.

(Rincian Belanja Modalnya Peralatan dan Mesin terlampir pada Lampiran Pendukung B.7).

Belanja Modal
Lainnya
Rp1.440.320.178,00

B.5.2. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Modal Lainnya pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Modal Lainnya.

Realisasi Belanja Modal Lainnya (*Netto*) per 31 Desember 2021 adalah Rp1.440.320.178,00 atau 98,84 persen dari Pagu Anggaran setelah revisi senilai Rp1.457.200.000,00.

Realisasi Belanja Modal Lainnya (*Netto*) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah Rp1.440.320.178,00 dan Rp0,00.

Tabel B.5.2.1
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	31-Dec-21			31-Dec-20			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran	Realisasi (Bruto)	%	Anggaran	Realisasi (Bruto)	%	(Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)			
Belanja Modal Lainnya	1.457.200.000	1.440.320.178	98,84	115.000.000	83.930.000	72,98	1.356.390.178	25,86
Jumlah Belanja Modal Lainnya (Bruto)	1.457.200.000	1.440.320.178	98,84	115.000.000	83.930.000	72,98	1.356.390.178	25,86
Pengembalian Belanja	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal Lainnya (Netto)	1.457.200.000	1.440.320.178	98,84	115.000.000	83.930.000	72,98	1.356.390.178	25,86

Kenaikan realisasi belanja modal lainnya tahun 2021 sebesar Rp1.356.390.178,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, karena meningkatnya kebutuhan untuk renovasi Gedung B.

(Rincian Belanja Modal Lainnya terlampir pada Lampiran Pendukung B.8).

Belanja
Penambahan
Nilai Aset Tetap
Lainnya
Rp396.229.854,00

B.5.3. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya (*Netto*) per 31 Desember 2021 adalah Rp396.229.854,00 atau 91,72 persen dari Pagu Anggaran setelah revisi senilai Rp432.000.000,00.

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya (*Netto*) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah Rp396.229.854,00 dan Rp86.576.600,00.

Rincian Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya jika dibandingkan per 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel B.5.3.1
Perbandingan Realisasi Belanja Penambahan Nilai
Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	31-Dec-21			31-Dec-20			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	(Rp)	%
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	432.000.000	396.229.854	91,72	100.000.000	86.576.600	86,58	309.653.254	5,14
Jumlah Belanja Modal Lainnya (Bruto)	432.000.000	396.229.854	91,72	100.000.000	86.576.600	86,58	309.653.254	5,14
Pengembalian Belanja	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal Lainnya (Netto)	432.000.000	396.229.854	91,72	100.000.000	86.576.600	86,58	309.653.254	5,14

Kenaikan realisasi belanja penambahan nilai aset tetap lainnya tahun 2021 sebesar Rp309.653.254,00 dibandingkan dengan realisasi belanja penambahan nilai aset tetap lainnya tahun 2020 karena adanya penambahan pengembangan sistem aplikasi yang ada di Itjen Kementan.

(Rincian Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap lainnya terlampir pada Lampiran Pendukung B.9).

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar

Rp619.367.674,00

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp619.367.674,00 dan Rp432.976.787,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut .

Tabel C.1.1

Rincian Aset Lancar

per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Aset Lancar	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	580.200
3	Piutang Bukan Pajak	-	14.000.000
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	-	(70.000)
5	<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	-	13.930.000
6	Persediaan	619.367.674	418.466.587
Jumlah		619.367.674	432.976.787

Tabel C.1.2

Aset Lancar Unaudited dan Audited

per 31 Desember 2021

No	Aset Lancar	Unaudited 31 Desember 2021	Audited 31 Desember 2021	Koreksi
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-	
3	Piutang Bukan Pajak	-	-	
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	-	-	
5	<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	-	-	
6	Persediaan	618.829.274	619.367.674	538.400
Jumlah		618.829.274	619.367.674	538.400

Nilai Aset Lancar Audited tahun 2021 mengalami perubahan pada akun persediaan senilai Rp538.400,00, karena adanya update aplikasi persediaan.

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,00*

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00, yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Akun Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00 karena seluruh UP dan TUP telah dipertanggungjawabkan.

Tabel C.1.1.1

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Aset Lancar	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Uang Tunai di brankas Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Saldo Rekening Bank Mandiri an. BPG 139 Itjen Kementan per 31 Desember 2021	-	-
3	Piutang Bukan Pajak	-	-
4	Sisa LS yang belum disetor	-	-
Jumlah		-	-

*Kas Lainnya Dan
Setara Kas Rp0,00*

C.1.2. Kas Lainnya Dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp580.200,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang

siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo Kas dan Setra Kas Lainnya senilai Rp580.200,00 merupakan Sisa LS Bendahara tahun 2020 yang sampai dengan tanggal pelaporan (31 Desember 2020) belum disetor. Sisa LS tersebut telah disetorkan seluruhnya pada tanggal 24 Maret 2021 (rekapitulasi Sisa LS Bendahara Tahun 2020 yang menjadi PNBK Tahun 2021 dan setoran sisa LS Tahun 2020 terlampir), sehingga per 31 Desember 2021 saldo kas dan setara kas lainnya adalah nihil.

*Piutang Bukan Pajak
Rp0,00*

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp14.000.000,00 yang merupakan Hak /pengakuan pemerintah atas uang atau jasa dari entitas lain terhadap pelayanan yang telah diberikan pemerintah baru dipotong atau disetorkan ke Kas Negara tahun berikutnya.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 senilai Rp14.000.000,00 merupakan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional. Piutang tersebut telah dilunasi pada tanggal 27 Januari 2021, dengan Nomor NTPN 3222655DED2IEV6N (bukti setor terlampir), sehingga per 30 Juni 2021 saldo piutang bukan pajak adalah nihil.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-
Piutang Bukan Pajak
Rp0,00*

C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan (Rp70.000,00).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan estimasi ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing – masing piutang. Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Piutang Bukan Pajak merupakan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional tahun sebelumnya. Karena pada bulan Januari 2021 piutang tersebut telah dilunasi sehingga penyisihan piutang per 31 Desember 2021 adalah nihil.

*Piutang Bukan Pajak
(Netto) Rp0,00*

C.1.5. Piutang Bukan Pajak (Netto)

Saldo Piutang Bukan Pajak (Netto) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0,00 dan Rp13.930.000,00.

Piutang Bukan Pajak (Netto) adalah selisih saldo Piutang Bukan Pajak dengan saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Bukan Pajak.

*Persediaan
Rp619.367.674,00*

C.1.6. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah senilai Rp619.367.674,00 dan Rp418.466.587,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kondisi atas semua jenis persediaan di atas dalam kondisi baik.

Rekapan Perhitungan Persediaan per 31 Desember 2021 yaitu sebagai berikut .

Saldo persediaan per 31 Desember 2020		418.466.587
Mutasi Tambah		1.487.702.716
Pembelian		
- Pembelian 5218	1.487.702.716	
Total pembelian	1.487.702.716	
Mutasi Kurang		(1.286.801.629)
Pemakaian		
- Beban Persediaan Konsumsi	(1.253.143.417)	
- Beban Persediaan Lainnya	(29.908.212)	
- Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	(3.750.000)	
Total Pemakaian	(1.286.801.629)	
Saldo Persediaan per 31 Desember 2021		619.367.674

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut.

Tabel C.1.6.1

Rincian Persediaan

per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Barang Konsumsi	Rp 619.367.674	Rp 393.880.875	Rp 225.486.799	57,25
2	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp -	Rp 700.000	Rp (700.000)	100,00
3	Persediaan Lainnya	Rp -	Rp 23.885.712	Rp (23.885.712)	(100,00)
	Jumlah	Rp 619.367.674	Rp 418.466.587	Rp 200.901.087	48,01

Saldo Persediaan tahun 2021 meningkat sebesar Rp200.901.087,00 jika dibandingkan dengan persediaan tahun 2020 disebabkan meningkatnya realisasi belanja persediaan di tahun 2021 dan berkurangnya pemakaian persediaan pada tahun 2021.

Tabel C.1.6.2

Nilai Persediaan Unaudited dan Audited

Per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Unaudited 2021 (Rp)	Audited 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Barang Konsumsi	Rp 618.829.274	Rp 619.367.674	Rp 538.400
2	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp -	Rp -	Rp -
3	Persediaan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 618.829.274	Rp 619.367.674	Rp 538.400

Perubahan nilai unaudited dengan Audited pada neraca karena terdapat barang persediaan (1010301011.000004-isi hekmasine kecil) yang mengalami perubahan senilai Rp538.400,00 karena metode perhitungan FIFO pada Apikasi Persediaan versi 21.1.0.

Aset Tetap

Rp11.837.806.090,
00

C.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap (Netto setelah Akumulasi Penyusutan) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah senilai Rp11.837.806.090,00 dan Rp6.290.412.344,00. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut .

Tabel C.2

Rincian Aset Tetap

per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Peralatan dan Mesin	Rp 37.737.841.234	Rp 29.970.764.825	Rp 7.767.076.409
2	Gedung dan Bangunan	Rp 329.071.000	Rp 329.071.000	Rp -
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 164.500.000	Rp -	Rp 164.500.000
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 107.231.970	Rp 107.231.970	Rp -
	Jumlah	Rp 38.338.644.204	Rp 30.407.067.795	Rp 7.931.576.409
	Akum. Penyusutan	Rp (26.500.838.114)	Rp (24.116.655.451)	Rp (2.384.182.663)
	Nilai Buku Aset Tetap	Rp 11.837.806.090	Rp 6.290.412.344	Rp 5.547.393.746

Peralatan dan Mesin

Rp37.737.841.234,00

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp37.737.841.234,00 dan Rp29.970.764.825,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel C.2.1
Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	29.970.764.825,00
Mutasi Tambah :		
- Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin	Rp	1.603.590.367,00
- Pengadaan Penambahan nilai belanja modal peralatan dan mesin	Rp	195.552.500,00
- Transfer Masuk	Rp	8.434.844.000,00
Mutasi Tambah	Rp	10.233.986.867,00
Mutasi Keluar :		
- Transfer Keluar	Rp	23.815.000,00
- Reklas ke aset lain-lain		2.443.095.458,00
Mutasi Kurang	Rp	2.466.910.458,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	37.737.841.234,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020	Rp	(26.391.375.199,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	Rp	11.346.466.035,00

(Nilai buku peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 Rp11.346.466.035,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp26.391.375.199,00 sesuai dengan nilai buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 pada tabel Penyusutan Aset Tetap). (*Rincian Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran*).

Mutasi Tambah

Mutasi Tambah senilai R10.233.986.867,00 adalah sebagai berikut .

- a. Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp1.799.142.867,00 yang terdiri dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp1.603.590.367,00 dan Penambahan nilai belanja modal peralatan dan mesin (menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin) senilai Rp195.552.500,00 berupa rekondisi meja rapat pada

ruang rapat SPI Itjentan. (Rincian dapat dilihat di Lampiran Pendukung “Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin”).

- b. Transfer masuk senilai Rp8.434.844.000,00 terdiri dari.
- Transfer Masuk BAST No.7910/PL.310/K.1/04/ tanggal 28 April tahun 2021 berupa 1 unit sedan Camry untuk kegiatan operasional Inspektur Jenderal Kementan senilai Rp635.000.000,00 dari Sekretariat Badan Karantina Pertanian .
 - Transfer Masuk BAST No. B.333/PL.310/B.1/ 05.2021 tanggal 24 Mei 2021 berupa peralatan dan mesin lainnya pada ruangan Agriculture War Room (AWR) Itjentan senilai Rp3.493.105.000,00 (setelah dikurangi nilai ekstrakomtabel senilai Rp1.720.000,00) dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - Transfer Masuk BAST No. 5104/PL.320/A.5/9/2021 tanggal 6 September tahun 2021 berupa 2 unit AC dan 4 unit Dehumidifer sebesar Rp92.244.600,00 dari Biro Umum dan Pengadaan Setjen.
 - Transfer Masuk dari Biro Keuangan dan BMN No. B-4937/PL.130/A4/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 sebanyak 4 unit sebanyak Rp55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
 - Transfer Masuk dari Ditjen Tanaman Pangan BAST No.B-2724/PL.230/C.1/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021 sebanyak 367 unit sebesar Rp 4.069.307.600 (Empat Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
 - Transfer Masuk dari Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian No. B-2888.1/PL.130/H.1/11/2021 tanggal 29 November 2021 sebanyak 3 unit sebesar Rp90.186.800 (Sembilan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Mutasi Keluar

Mutasi Kurang senilai Rp2.466.910.458,00 yang terdiri dari.

- a. Transfer keluar Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) senilai Rp23.815.000,00 dengan BAST No.B-213/PL.020/G.1/09/2021 tanggal 8 September 2021 kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- b. Reklas dari akun peralatan dan mesin ke akun aset Lain-lain (Penghentian Aset dari penggunaan Operasional Pemerintah) sebanyak 383 unit senilai Rp2.443.095.458,00.

*Gedung dan Bangunan
Rp329.071.000,00*

C.2.2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah senilai Rp329.071.000,00 dan Rp329.071.000,00. Nilai Gedung dan Bangunan tersebut merupakan Bangunan gudang tertutup permanen milik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Gedung dan Bangunan telah dilakukan Revaluasi pada Tahun 2019, sesuai dengan Laporan Hasil IP No. LHIP-72/REV/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 27 November 2019 dan dicatat pada aplikasi SIMAK BMN.

Rincian Hasil Revaluasi adalah sebagai berikut .

Tabel C.2.2

Rincian Revaluasi Gedung dan Bangunan

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Gedung dan Bangunan sebelum Revaluasi	379,263,000
Nilai Koreksi BMN	(50,192,000)
Saldo Gedung dan Bangunan setelah Revaluasi	329,071,000

Pada tahun 2021 tidak terdapat anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan dan tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang.

(Nilai buku gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp297.564.205,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan senilai Rp31.506.795,00 sesuai dengan nilai buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 tabel Penyusutan Aset Tetap). (Rincian Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran).

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp164.500.000,00

C.2.3. Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dapat diukur secara handal.

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah senilai Rp164.500.000,00 dan Rp0,00. Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan transfer masuk berupa jaringan dan instalasi untuk ruang Agriculture War Room (AWR) Itjentan senilai Rp164.500.000,00 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

(Nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp141.400.000,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan senilai Rp23.100.000,00 sesuai dengan nilai buku Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 tabel Penyusutan Aset Tetap).

Aset Tetap Lainnya
Rp107.231.970,00

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp107.231.970,00 dan Rp107.231.970,00.

Mutasi nilai aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel C.2.4
Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	107.231.970,00
Mutasi Tambah :		
- Pengadaan belanja modal lainnya (ATR)	Rp	1.254.461.978,00
Mutasi Tambah	Rp	1.254.461.978,00
Mutasi Kurang :		
- Transfer Keluar		1.254.461.978,00
Mutasi Kurang	Rp	1.254.461.978,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	107.231.970,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020	Rp	(54.856.120,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	Rp	52.375.850,00

- a. Mutasi tambah merupakan Aset Tetap dalam Renovasi senilai Rp1.254.461.978 yang berasal dari perolehan dengan renovasi gedung dan bangunan (Rincian dapat dilihat pada Lampiran Pendukung C.8.Pengadaan Belanja Modal Lainnya (ATR).
- b. Mutasi kurang senilai Rp1.254.461.978 merupakan transfer keluar ke Biro Umum dan Pengadaan Setjen dengan No BAST- B.2130/PL.020/ G.1/09/2021 tanggal 8 September 2021.

(Nilai buku Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp52.375.850,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan senilai Rp54.856.120,00 sesuai dengan nilai buku Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 tabel Penyusutan Aset Tetap).

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp26.500.838.114,0
0)

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing (Rp26.500.838.114,00) dan (Rp24.116.655.451,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel C.2.5

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2021

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akml. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	37.737.841.234	26.391.375.199	11.346.466.035
2	Gedung dan Bangunan	329.071.000	31.506.795	297.564.205
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	164.500.000	23.100.000	141.400.000
4	Aset Tetap Lainnya	107.231.970	54.856.120	52.375.850
Jumlah		38.338.644.204	26.500.838.114	11.837.806.090

(Nilai akumulasi penyusutan aset tetap telah sesuai dengan Tabel Penyusutan per 31 Desember 2021).

Aset Lainnya
Rp499.016.286,00

C.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Nilai Aset Lainnya (Netto setelah Akumulasi Penyusutan/Amortisasi) pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp499.016.286,00 dan Rp731.820.203,00.

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut .

Tabel C.3
Rincian Aset Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Aset Tak Berwujud	2.785.064.094	2.202.976.040	582.088.054
2	Aset Lain-lain	2.443.095.458	-	2.443.095.458
3	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(4.729.143.266)	(1.471.155.837)	(3.257.987.429)
Nilai Buku Aset Lainnya		499.016.286	731.820.203	(232.803.917)

Aset Tak Berwujud
Rp2.785.064.094,00

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp2.785.064.094,00 dan Rp2.202.976.040,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Penambahan nilai aset tak berwujud senilai Rp582.088.054,00 merupakan pengadaan pengerjaan Rebuild Website Itjentan, pengadaan aplikasi Agricultural Risk Management System (ARMS), pengadaan aplikasi Sistem Audit Berkelanjutan atas Program Pembangunan Pertanian (SABERTANI) dan pengembangan aplikasi pada Itjentan. (rincian dapat dilihat pada Lampiran pendukung “Realisasi Belanja Modal Lainnya dan Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap lainnya dan/atau Aset Lainnya”).

Aset Tak Berwujud pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. (rincian aset tak berwujud dilampirkan dalam lampiran).

Aset Lain-lain
Rp2.443.095.458,00

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp2.443.095.458,00 dan Rp0,00.

Aset Lain-lain merupakan aset peralatan dan mesin yang direklas ke aset lainnya sebagai asset yang dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintah, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Penghentian Aset dari penggunaan Operasional Pemerintah No.B-2480/PL.320/G.1/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 berupa Kendaraan bermotor sebanyak 4 unit sebesar Rp515.479.500,00.
- b. Penghentian Aset dari Penggunaan Operasional Pemerintah No.B-3052/PL.320/G.1/11/2021 tanggal 5 November 2021 berupa peralatan dan mesin sebanyak 383 unit sebesar Rp 1.927.615.958,00.

C.3.3.Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp4.729.143.266,00)

Nilai Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah (Rp4.729.143.266,00) dan (Rp1.471.155.837,00).

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel C.3.3

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akml. Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	2.785.064.094	(2.422.308.058)	362.756.036
Aset Lain-lain	2.443.095.458	(2.306.835.208)	136.260.250
Total	5.228.159.552	(4.729.143.266)	499.016.286

Kewajiban Jangka
Pendek Rp57.048.162,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp57.048.162,00 dan Rp112.830.792,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel C.4

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember dan 31 Desember 2020

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp 57.048.162	Rp 112.830.792
Uang Muka dari KPPN	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 57.048.162	Rp 112.830.792

Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp57.048.162,00

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp57.048.162,00 dan Rp112.830.792,00.

Utang kepada pihak ketiga adalah kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 senilai Rp57.48.162,00 adalah sebagai berikut.

Tabel C.4.1.1
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	NILAI
1	Uang Makan Pegawai bulan Desember 2021 (sudah direalisasikan pada tanggal 18 Januari 2021)	Rp 52.402.000
2	Tagihan pemakaian Telephone bulan Desember 2021 (telah dibayarkan di tanggal 14 Januari 2021)	Rp 834.162
3	Kekurangan pembayaran gaji pegawai karena Kenaikan Pangkat di tahun 2021 (akan dibayarkan melalui SPM Gaji)	Rp 3.812.000
	Total	Rp 57.048.162

Rincian Pelunasan Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 senilai Rp112.830.792,00, sebagai berikut .

Tabel C.4.1.2
Rincian Pelunasan Utang Kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	NILAI
1	Uang Makan Pegawai bulan Desember 2020 (sudah direalisasikan pada tanggal 22 Januari 2021)	Rp 103.362.850
2	Tagihan pemakaian Telephone bulan Desember 2020 (telah dibayarkan di tanggal 19 Januari 2021)	Rp 893.442
3	Kekurangan pembayaran gaji pegawai karena Kenaikan Pangkat di tahun 2020	Rp 5.799.500
4	Kekurangan pembayaran Tunjangan Fungsional tahun 2020	Rp 2.775.000
	Total	Rp 112.830.792

(Rincian pelunasan utang tahun 2020 yang telah dibayarkan dan bukti setornya dapat dilihat pada lampiran pendukung).

Uang Muka dari
KPPN Rp0,00

C.4.2. Uang Muka KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN Jakarta V sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal Pelaporan.

Ekuitas

Rp12.899.141.888,0

0

C.5. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing senilai Rp12.899.141.888,00 dan Rp7.342.378.542,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan dalam pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan pada periode sebelumnya.

Apabila dibandingkan perbedaan nilai atas Pendapatan LRA dan LO per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel D

Perbandingan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada LO dan LRA per 31 Desember 2021

Uraian	LO	LRA	Selisih	Referensi
Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya	-	-	-	-
Pendapatan Pelepasan aset Non Lancar	119.309.445	119.309.445	-	D.9.1.2
Pendapatan Non Operasional Lainnya	12.581.110	27.161.310	- 14.580.200	D.9.2.1.2
Jumlah	131.890.555	146.470.755	- 14.580.200	

Selisih senilai Rp14.580.200,00 terdiri dari setoran Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp14.000.000,00 yang merupakan pelunasan piutang lainnya dan setoran Penerimaan Kembali Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp580.200,00 yang merupakan sisa perjalanan dinas tahun 2020 yang baru disetorkan di tahun 2021, sebagai pengurang akun Kas dan setara kas lainnya pada Neraca tahun 2020.

Pendapatan PNB
Rp0,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing masing adalah Rp0,00 dan Rp1.715.940,00,00. Pada tahun 2021 tidak ada realisasi pendapatan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Beban Pegawai
Rp21.409.082.201,0
0

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp21.409.082.201,00 dan Rp22.135.349.288,00. Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel D.2.1
Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	15.045.561.624	15.045.917.113	(355.489)	(0,00)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	211.130	194.210	16.920	8,71
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.105.075.748	1.106.496.636	(1.420.888)	(0,13)
Belanja Tunjangan anak PNS	305.821.062	309.990.346	(4.169.284)	(1,34)
Belanja Tunjangan Struktural PNS	315.794.800	439.860.000	(124.065.200)	(28,21)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.271.409.350	1.909.784.450	361.624.900	18,94
Belanja Tunjangan PPh PNS	137.267.217	118.353.183	18.914.034	15,98
Belanja Tunjangan Beras PNS	799.227.120	697.404.600	101.822.520	14,60
Belanja Uang Makan PNS	1.138.721.150	1.522.204.750	(383.483.600)	(25,19)
Belanja Tunjangan Umum PNS	212.520.000	287.590.000	(75.070.000)	(26,10)
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	52.395.000	681.135.000	(628.740.000)	(92,31)
Belanja Uang Lembur	25.078.000	16.419.000	8.659.000	52,74
Jumlah	21.409.082.201	22.135.349.288	(726.267.087)	(3,28)

Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp726.267.087,00 atau 3,28 persen dibanding beban pegawai per 31 Desember 2020. Penurunan beban yang cukup signifikan yaitu pada akun gaji pokok pegawai non PNS yang

disebabkan adanya revisi sisa anggaran terhadap sisa anggaran akun tersebut yang dipindahkan ke akun belanja keperluan perkantoran (5211111).

Rincian Perbandingan Realisasi Beban Pegawai dan Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel D.2.2
Realisasi Beban dan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2021

No	Kode Perkiraan	Uraian	Realisasi Beban/Belanja Pegawai		
			LO	LRA	Selisih
01	511111	Beban/Belanja Gaji Pokok PNS	15.045.561.624	15.047.430.836	(1.869.212)
02	511119	Beban/Belanja Pembulatan Gaji PNS	211.130	211.316	(186)
03	511121	Beban/Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.105.075.748	1.105.175.012	(99.264)
04	511122	Beban/Belanja Tunj. Anak PNS	305.821.062	305.839.900	(18.838)
05	511123	Beban/Belanja Tunj.Struktural PNS	315.794.800	315.794.800	-
06	511124	Beban/Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.271.409.350	2.274.184.350	(2.775.000)
07	511125	Beban/Belanja Tunj.PPh PNS	137.267.217	137.267.217	-
08	511126	Beban/Belanja Tunj. Beras PNS	799.227.120	799.227.120	-
09	511129	Beban/Belanja Uang Makan PNS	1.138.721.150	1.189.682.000	(50.960.850)
10	511151	Beban/Belanja Tunjangan Umum PNS	212.520.000	212.520.000	-
11	511511	Beban/Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	52.395.000	52.395.000	-
12	512211	Belanja Uang Lembur	25.078.000	25.078.000	-
			21.409.082.201	21.464.805.551	(55.723.350)

Realisasi Beban Pegawai pada Laporan Operasional (LO) senilai Rp21.409.082.201,00 dan realisasi Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp21.464.805.551,00 sehingga terdapat selisih lebih kecil pada Laporan Operasional senilai Rp55.723.350,00, karena adanya utang kepada pegawai terhadap Tahun Anggaran 2021 senilai Rp56.214.000,00, dan pelunasan utang pegawai senilai Rp111.937.350,00, sehingga secara akrual mengurangi nilai beban pegawai pada tahun 2021 (rincian utang kepada pihak ketiga dan pelunasannya dapat dilihat pada lampiran utang dan pelunasan utang kepada pihak ketiga).

Rincian penjelasan selisih Realisasi Belanja Pegawai (LRA) dengan Beban Pegawai (LO) adalah sebagai berikut.

Tabel D.2.3

**Rincian Selisih Belanja Pegawai dan Beban Pegawai
Per 31 Desember 2021**

No	Kode Perkiraan	Uraian	LRA 31 Desember 2020	Utang Kepada Pihak ketiga Tahun 2020	Pelunasan Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019	LO 31 Desember 2020	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	
01	511111	Beban/Belanja Gaji Pokok PNS	15.047.430.836	3.632.533	5.501.745	15.045.561.624	Kekurangan pembayaran gaji pokok pegawai, pembulatan,
02	511119	Beban/Belanja Pembulatan Gaji	211.316	(121)	65	211.130	sumi/Istri, Tunjangan Anak tahun 2021 karena adanya
03	511121	Beban/Belanja Tunj. Suami/Istri	1.105.175.012	143.016	242.280	1.105.075.748	Pangkat dan pelunasan Utang Pegawai tahun 2020
04	511122	Beban/Belanja Tunj. Anak PNS	305.839.900	36.572	55.410	305.821.062	
05	511123	Beban/Belanja Tunj.Struktural	315.794.800	-	-	315.794.800	-
06	511124	Beban/Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.274.184.350	-	2.775.000	2.271.409.350	Pelunasan utang tunjangan Fungsional tahun 2020
07	511125	Beban/Belanja Tunj.PPh PNS	137.267.217	-	-	137.267.217	-
08	511126	Beban/Belanja Tunj. Beras PNS	799.227.120	-	-	799.227.120	-
09	511129	Beban/Belanja Uang Makan PNS	1.189.682.000	52.402.000	103.362.850	1.138.721.150	Kekurangan pembayaran uang makan bulan Desember 2021 dan Pelunasan Utang uang
10	511151	Beban/Belanja Tunjangan	212.520.000	-	-	212.520.000	
11	511511	Beban/Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	52.395.000	-	-	52.395.000	
12	512211	Belanja Uang Lembur	25.078.000	-	-	25.078.000	
			21.464.805.551	56.214.000	111.937.350	21.409.082.201	

Beban Persediaan
Rp1.283.051.629,0
0

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.283.051.629,00 dan Rp1.343.210.791,00.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel D.3.1
Rincian Beban Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	1.253.143.417	1.155.368.170	97.775.247	8,46
Beban Persediaan Lainnya	29.908.212	187.842.621	(157.934.409)	(84,08)
Jumlah Beban Persediaan	1.283.051.629	1.343.210.791	(60.159.162)	(4,48)

Realisasi Beban Persediaan per 31 Desember 2021 mengalami penurunan senilai Rp60.159.162,00 atau 4,48 persen jika dibandingkan dengan beban persediaan per 31 Desember 2020 karena adanya efisiensi pemakaian Alat Tulis Kantor (ATK) pada Inspektorat Jenderal Kementan.

Beban persediaan pada LO merupakan mutasi persediaan keluar yaitu senilai Rp1.286.801.629,00 dan beban persediaan per 31 Desember 2021 senilai Rp1.283.051.629,00 ditambah dengan beban persediaan bahan pemeliharaan senilai Rp3.750.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran D.2. Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Pesediaan Per 31 Desember 2021.

Tabel D.3.2
Beban Persediaan Unaudited dan Audited
per 31 Desember 2021

Uraian Jenis Beban	Unaudited	Audited	Koreksi
	31 Desember 2021	31 Desember 2020	
Beban Persediaan Konsumsi	1.253.681.817	1.253.143.417	538.400
Beban Persediaan Lainnya	29.908.212	29.908.212	-
Jumlah Beban Persediaan	1.283.590.029	1.283.051.629	538.400

Beban Barang dan
Jasa
Rp9.020.542.076,0
0

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa adalah konsumsi atas barang dan/ atau jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lainnya berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Jumlah Beban Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.020.542.076,00 dan Rp8.138.666.411,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel D.4.1
Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.196.398.597	409.084.790	787.313.807	192,46
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	92.490.000	191.946.000	(99.456.000)	(51,81)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	460.572.000	532.091.000	(71.519.000)	(13,44)
Beban Barang Operasional Lainnya	49.397.100	37.590.700	11.806.400	31,41
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID	600.473.792	1.016.411.172	(415.937.380)	(40,92)
Beban Bahan	882.666.590	873.781.484	8.885.106	1,02
Beban Honor Output Kegiatan	58.950.000	140.390.000	(81.440.000)	(58,01)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.343.278.459	770.694.600	1.572.583.859	204,05
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID	-	625.411.110	(625.411.110)	(100,00)
Beban Langganaan Telepon	9.706.497	13.319.305	(3.612.808)	(27,12)
Beban Sewa	203.098.000	46.300.000	156.798.000	338,66
Beban Jasa Profesi	545.455.000	2.207.670.000	(1.662.215.000)	(75,29)
Beban Jasa Lainnya	239.310.287	-	239.310.287	100,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19	2.338.745.754	1.273.976.250	1.064.769.504	83,58
JUMLAH	9.020.542.076	8.138.666.411	881.875.665	10,84

Realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan senilai Rp881.875.665,00 atau 10,84 persen jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 dan kenaikan yang cukup signifikan pada akun belanja gaji pegawai non PNS karena adanya revisi sisa anggaran belanja gaji non PNS dari belanja pegawai ke

belanja keperluan kantor sehingga anggaran dan beban keperluan perkantoran meningkat dan meningkatnya beban non operasional lainnya karena meningkatnya pagu anggaran dan kebutuhan akan belanja non operasional lainnya tahun 2021.

Pada tahun 2021 terdapat beban barang non operasional dan beban jasa -penanganan Pandemi COVID-19 senilai Rp2.939.219.546,00 atau 95,17 persen dari alokasi anggaran (setelah revisi) senilai Rp3.088.398.000,00. Dan realisasi beban tersebut sesuai dengan realisasi anggaran karena realisasi belanja penanganan Covid-19 telah sesuai dengan akun belanja penanganan Covid-19.

Rincian Perbandingan Realisasi Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut .

Tabel D.4.2
Perbandingan Realisasi Beban dan Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2021

No	Kode Perkiraan	Uraian	Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa		
			LO	LRA	Selisih
01	521111	Beban/Belanja Keperluan Perkantoran	1.196.398.597	1.196.398.597	-
02	524114	Beban/Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	92.490.000	92.490.000	-
03	521115	Beban/Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	460.572.000	460.572.000	-
04	521119	Beban/Belanja Barang Operasional Lainnya	49.397.100	49.397.100	-
05	521131	Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID	600.473.792	600.473.792	-
06	521211	Beban/Belanja Bahan	882.666.590	882.666.590	-
07	521213	Beban/Belanja Honor Output Kegiatan	58.950.000	58.950.000	-
08	521219	Beban/Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.343.278.459	2.343.278.459	-
09	522112	Beban/Belanja Langgaanan Telepon	9.706.497	9.765.777	(59.280)
10	522141	Beban/Belanja Sewa	203.098.000	203.098.000	-
11	522151	Beban/Belanja Jasa Profesi	545.455.000	545.455.000	-
12	522191	Beban/Belanja Jasa Lainnya	239.310.287	239.310.287	-
13	522192	Beban/Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19	2.338.745.754	2.338.745.754	-
			9.020.542.076	9.020.601.356	(59.280)

Realisasi Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional (LO) senilai Rp9.020.545.076,00 dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp9.020.601.356,00

sehingga terdapat selisih lebih kecil pada Laporan Operasional senilai Rp59.280,00, karena adanya pembayaran pemakaian jasa telekomunikasi bulan Desember 2020 senilai Rp893.442,00 yang seharusnya dibebankan pada periode pelaporan tahun 2020 namun baru direalisasikan tanggal 19 Januari 2021, sehingga mengurangi nilai beban langganan telepon tahun 2021 dan pemakaian jasa telekomunikasi bulan Desember 2021 senilai Rp834.162,00 yang masih terutang dan dibebankan di tahun 2022 sehingga menambah nilai beban langganan telepon tahun 2021.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.343.802.420,00 dan Rp2.197.696.304,00.

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel D.5.1
Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	360.025.133	195.420.930	164.604.203	84,23
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.769.918.887	1.873.075.654	(103.156.767)	(5,51)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210.108.400	111.863.000	98.245.400	87,83
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3.750.000	11.676.615	(7.926.615)	(67,88)
Beban Persediaan suku cadang	0	5.660.105	(5.660.105)	(100,00)
Jumlah	2.343.802.420	2.197.696.304	146.106.116	6,65

Beban
Pemeliharaan
Rp2.343.802.420,0
0

Realisasi Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp146.106.116,00 atau 6,65 persen jika dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020, karena meningkatnya kebutuhan belanja pemeliharaan gedung dan peralatan dan mesin.

Rincian Perbandingan Beban dan Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel D.5.2
Perbandingan Realisasi Beban dan Belanja Pemeliharaan
Per 31 Desember 2021

No	Kode Perkiraan	Uraian	Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa		
			LO	LRA	Selisih
01	523111	Beban/Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	360.025.133	360.025.133	-
02	523121	Beban/Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.769.918.887	1.769.918.887	-
03	523129	Beban/Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210.108.400	210.108.400	-
04	593113	Beban/Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3.750.000	-	3.750.000
			2.343.802.420	2.340.052.420	3.750.000

Realisasi Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional (LO) senilai Rp2.343.802.420,00 dan realisasi Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp2.340.052.420,00 sehingga terdapat selisih lebih besar pada Laporan Operasional senilai Rp3.750.000,00.

Selisih perbandingan Beban dan Belanja Pemeliharaan dikarenakan pemakaian barang habis pakai berupa persediaan bahan untuk pemeliharaan merupakan akun persediaan dan realisasi belanjanya menggunakan belanja persediaan.

Beban Perjalanan Dinas
Rp50.043.414.625,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp50.043.414.625,00 dan Rp38.637.024.516,00.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel D.6.1
Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Perjalanan Biasa	39.458.342.875	28.848.083.956	10.610.258.919	36,78
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	449.710.000	338.849.480	110.860.520	32,72
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41.326.000	1.136.799.000	(1.095.473.000)	(96,36)
Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi COVID 19	-	790.650.000	(790.650.000)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.094.035.750	7.522.642.080	2.571.393.670	34,18
Jumlah	50.043.414.625	38.637.024.516	11.406.390.109	29,52

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp11.406.390.109,00 atau 29,52 persen jika dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020. Kenaikan beban realisasi anggaran perjalanan dinas pada tahun 2021 karena meningkatnya anggaran belanja perjalanan biasa, perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas paket meeting Luar kota sehingga beban perjalanan dinas tahun 2021 meningkat. Dari peningkatan global beban perjalanan dinas tahun 2021 terjadi pula penurunan beban perjalanan dinas terhadap akun belanja perjalanan dinas penanganan pandemi Covid-19 karena tidak dianggarkan dan penurunan anggaran paket meeting dalam kota karena tidak adanya anggaran untuk kegiatan Rapat Kerja Diluar Jam Kantor (RDK) sehingga beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota menurun.

Rincian Perbandingan Realisasi Beban dan Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut .

Tabel D.6.2.

Perbandingan Realisasi Beban dan Belanja Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2021

No	Kode Perkiraan	Uraian	Realisasi Beban/Belanja Perjalanan Dinas		
			LO	LRA	Selisih
01	524111	Beban/Belanja Perjalanan Biasa	39.458.342.875	39.458.342.875	-
02	524113	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	449.710.000	449.710.000	-
03	524114	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41.326.000	41.326.000	-
04	524119	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.094.035.750	10.094.035.750	-
			50.043.414.625	50.043.414.625	-

Realisasi Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO) senilai Rp50.043.414.625,00 dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp50.043.414.625,00, sehingga tidak terdapat selisih.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp4.320.179.131,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing senilai Rp4.320.179.131,00 dan Rp2.832.072.977,00.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel D.7
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.452.629.760	2.252.278.270	1.200.351.490	53,29
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.001.510	7.001.510	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	15.400.000	-	15.400.000	-
Jumlah Penyusutan	3.475.031.270	2.259.279.780	1.215.751.490	53,81
Beban Amortisasi	835.679.371	565.762.510	269.916.861	47,71
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	9.468.490	7.030.687	2.437.803	34,67
Jumlah Amortisasi	845.147.861	572.793.197	272.354.664	47,55
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.320.179.131	2.832.072.977	1.488.106.154	52,54

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp1.488.106.154,00 atau 52,54 persen jika dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 , karena adanya penambahan nilai aset dari pembelian tahun berjalan dan transfer masuk dari Eselon I lainnya sehingga nilai penyusutannya juga meningkat.

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp4.320.179.131,00 sedangkan mutasi akumulasi penyusutan dan amortisasi 31 Desember 2021 adalah senilai Rp3.005.888.170,00, sehingga terdapat selisih senilai Rp1.329.690.961,00, dengan rincian sebagai berikut.

Selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan Mutasi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 senilai Rp1.329.690.961,00, dikarenakan.

- a. Beban penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp3.452.629.760,00 dan mutasi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp4.551.178367,00 sehingga ada selisih lebih kecil pada beban penyusutan peralatan dan mesin Rp1.098.548.607,00, karena adanya koreksi dari penyusutan

transaksional terhadap aset peralatan dan mesin yang merupakan transfer masuk dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dan Badan Karantina Pertanian.

- b. Beban Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp15.400.000,00 dan mutasi akumulasi penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp7.700.000,00 sehingga ada Selisih lebih besar pada beban penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp7.700.000,00 yang juga disebabkan karena adanya adanya koreksi dari penyusutan transaksional terhadap jaringan dan instalasi listrik untuk pengadaan AWR yang merupakan transfer masuk dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).
- c. Beban penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah senilai Rp9.468.490,00 dan mutasi akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah senilai Rp(2.403.371.078,00) sehingga ada selisih senilai Rp2.412.839.568,00, karena adanya adanya koreksi dari penyusutan transaksional.

Laporan Selisih Beban dan Mutasi Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 terlampir (lampiran D.3.)

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp(70.000,00)*

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban yang mencatat estimasi ketidaktertagihan Piutang PNBPN dan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing senilai Rp(70.000,00) dan Rp(1.800,00).

Beban Penyisihan Piutang lainnya senilai (Rp70.000,00) merupakan pengurangan saldo awal penyisihan piutang lainnya karena pelunasan piutang lainnya di tahun 2021, sehingga nilai penyisihannya menjadi nihil.

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Rp131.890.555,00

D.9 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing masing Rp131.890.555,00 dan Rp61.473.346,00.

Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel D.9

Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	119.309.445	(43.238.805)	162.548.250	(375,93)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12.581.110	104.712.151	(92.131.041)	(87,99)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	131.890.555	61.473.346	70.417.209	114,55

Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp70.417.209,00 karena adanya pendapatan lelang kendaraan operasional ltjentan pada tahun 2021.

D.9.1. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/Defisit dari Pelepasan aset Non Lancar terdiri dari pendapatan pelepasan aset non lancar dan beban kerugian pelepasan aset non lancar. Surplus/Defisit dari pelepasan aset non lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah Rp119.309.445,00 dan Rp(43.238.805,00).

Tabel D.9.1.1
Rincian Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	119.309.445	14.000.000	105.309.445	100,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	57.238.805	(57.238.805)	(100,00)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	119.309.445	(43.238.805)	162.548.250	(375,93)

Pada tahun 2021 terdapat pendapatan lelang kendaraan operasional Itjentan senilai Rp119.309.445,00 dan tidak terdapat beban pelepasan aset non lancar karena tidak terdapat transaksi aset keluar yang akan dilakukan penghapusan.

Tabel D.9.1.2
Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Lainnya Pada LO dan LRA Per 31 Desember 2021

Akun	Uraian	LO	LRA	Selisih
425911	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	119.309.445	119.309.445	-
	Jumlah	119.309.445	119.309.445	-

D.9.2. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing senilai Rp12.581.110,00 dan Rp104.712.151,00.

Rincian Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel D.9.2
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12.581.110	182.863.419	(170.282.309)	(93,12)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	78.151.268	(78.151.268)	(100,00)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	12.581.110	104.712.151	(92.131.041)	(87,99)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 menurun senilai Rp92.131.041,00 atau 87,99 persen dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 karena menurunnya Penerimaan kembali belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) karena adanya setoran sisa LS Perjalanan dinas tahun 2020 dan adanya perubahan metode perhitungan persediaan dari metode penilaian persediaan dengan metode Harga Perolehan Terakhir (HPT) menjadi metode First In First Out (FIFO) sehingga pada tahun 2021 tidak terdapat pendapatan dan beban penyesuaian penyesuaian persediaan.

D.9.2.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari kegiatan non Operasional Lainnya 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing senilai Rp12.581.110,00 dan Rp182.863.419,00.

Rincian Pendapatan dari kegiatan non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel D.9.2.1.1

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	10.737.510	3.693.572	7.043.938	190,71
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.843.600	64.200.457	(62.356.857)	(97,13)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	114.969.390	(114.969.390)	(100,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12.581.110	182.863.419	(170.282.309)	(93,12)

Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 menurun senilai Rp170.282.309,00 atau 93,12 persen dari per 1 Desember 2020, karena menurunnya realisasi pendapatan pada tahun 2021 dari setoran sisa LS Perjalanan dinas tahun 2020 dan perubahan perhitungan nilai persediaan yang diperhitungkan dengan nilai akhir sehingga menimbulkan

pendapatan penyesuaian persediaan, karena pada aplikasi persediaan tahun 2021 perhitungan nilai persediaan diperhitungkan dengan cara FIFO (First In First Out) sehingga tidak ada lagi pendapatan penyesuaian persediaan.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih lebih besar di LO sebesar Rp14.580.200,00, sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel D.9.2.1.2
Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pada LO dan LRA Per 31 Desember 2021

Akun	Uraian	LO	LRA	Selisih
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	10.737.510	24.737.510	(14.000.000)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.843.600	2.423.800	(580.200)
Jumlah		12.581.110	27.161.310	(14.580.200)

Selisih senilai Rp14.580.200,00 terjadi karena adanya setoran Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp14.000.000,00 yang merupakan pelunasan piutang lainnya dan setoran Penerimaan Kembali Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp580.200,00 yang merupakan sisa perjalanan dinas tahun 2020 yang disetorkan di tahun 2021, sebagai pengurang akun Kas dan setara kas lainnya pada Neraca tahun 2020.

D.9.2.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari kegiatan non operasional lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp78.151.268,00.

Penurunan nilai beban per 31 Desember 2021 senilai Rp78.151.268,00 karena pada tahun 2021 tidak terdapat juga

beban penyesuaian persediaan yang disebabkan adanya selisih perhitungan pembelian persediaan dengan metode penilaian persediaan dengan metode Harga Perolehan Terakhir (HPT), sebab perhitungan persediaan di tahun 2021 sudah menggunakan metode First In First Out (FIFO).

Rincian Beban dari kegiatan operasional lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel D.9.2.2
Rincian Beban dari Kegiatan Operasional Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	78.151.268	(78.151.268)	(100,00)
Beban Kegiatan Operasional Lainnya	-	78.151.268	(78.151.268)	(100,00)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp7.342.378.542,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.342.378.542,00 dan Rp6.422.801.087,00.

Surplus(defisit) LO

Rp(88.288.111.527,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar Rp88.288.111.527,00 dan Rp75.220.829.201,00.

Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa (laporan Operasional).

*Koreksi Yang Menambah
/Mengurangi Ekuitas
Yang Antar Lain Berasal
dari Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp0,00*

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antar Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada tahun 2021 tidak terdapat koreksi pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Transaksi Antar Entitas

Rp93.844.874.873,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp93.844.874.873,00 dan Rp76.140.406.656,00.

Rincian Transaksi antar Entitas untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel E.6
Rincian Transaksi Antar Entitas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Ditagihkan Ke Entitas Lain	87.992.269.567	76.171.876.625	11.820.392.942	15,52
Diterima dari Entitas Lain	(146.470.755)	(83.969.969)	(62.500.786)	74,43
Transfer Masuk	7.277.353.039	52.500.000	7.224.853.039	13.761,62
Transfer Keluar	(1.278.276.978)	-	(1.278.276.978)	-
Jumlah Transaksi Antar Entitas	93.844.874.873	76.140.406.656	17.704.468.217	23,25

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain / Ditagihkan Ke Entitas Lain

Diterima Dari Entitas Lain/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DDEL/DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Inspektorat Jenderal yang melibatkan ke Kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL senilai Rp146.470.755,00 sedangkan DKEL senilai Rp87.992.269.567,00.

E.4.2. Transfer Masuk / Transfer Keluar

Saldo Transfer Masuk (Intrakomtabel) periode 31 Desember 2021 disajikan senilai Rp7.277.353.039,00 dan Transfer Keluar periode 31 Desember 2021 senilai Rp1.278.276.978,00. Transfer Masuk/Keluar merupakan perpindahan aset / kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN.

Transfer masuk (setelah dikurang akumulasi penyusutannya) senilai Rp7.277.353.039,00 terdiri dari.

- a. Transfer masuk peralatan dan mesin senilai Rp92.244.600,00 dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yang dikurangi akumulasi penyusutannya senilai Rp16.614.400,00, sehingga nilai bukunya senilai Rp75.630.200,00.

- b. Transfer masuk peralatan dan mesin lainnya pada ruangan Agriculture War Room (AWR) Itjentan senilai Rp3.493.105.000,00 (setelah dikurangi nilai ekstrakomtabel senilai RP1.720.000,00) dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang dikurangi akumulasi penyusutan senilai Rp378.417.998,00, sehingga nilai bukunya senilai Rp3.114.687.002,00.
- c. Transfer masuk akun peralatan dan mesin berupa 1 unit sedan Camry untuk kegiatan operasional Inspektur Jenderal Kementan dari Sekretariat Badan Karantina Pertanian senilai Rp635.000.000,00 yang dikurangi akumulasi penyusutan senilai Rp45.357.143,00 sehingga nilai bukunya menjadi Rp589.642.857,00.
- d. Transfer masuk Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp164.500.000,00 berupa jaringan dan instalasi untuk ruang Agriculture War Room (AWR) Itjentan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang dikurangi akumulasi penyusutan senilai Rp7.700.000,00, sehingga nilai bukunya senilai Rp156.800.000,00.
- e. Transfer Masuk sebanyak 367 unit peralatan dan mesin dari Ditjen Tanaman Pangan senilai Rp4.069.307.600, yang dikurangi akumulasi penyusutannya senilai Rp873.901.420,00, sehingga nilai bukunya senilai Rp3.195.406.180,00.
- f. Transfer Masuk 4 unit laptop senilai Rp55.000.000,00 dari Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- g. Transfer Masuk 3 unit laptop senilai Rp90.186.800,00 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Transfer Keluar senilai Rp1.278.276.978,00 terdiri dari.

- h. Transfer Keluar peralatan dan mesin dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ke Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian senilai Rp23.815.000,00.
- i. Transfer Keluar Aset Tetap Renovasi (ATR) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ke Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang dicatat sebagai Gedung dan Bangunan senilai Rp1.254.461.978,00.

Rekapan Transfer Masuk dan Transfer keluar dapat dilihat pada Lampiran E.1.Laporan Transfer Keluar dan Transfer Masuk.

Kenaikan/Penurunan
Ekuitas
Rp5.556.763.346,00

E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Entitas untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.556.763.346,00 dan Rp919.577.455,00.

Kenaikan saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 senilai Rp5.556.763.346,00 dikarenakan meningkatnya realisasi belanja pada tahun 2021 dan adanya penambahan nilai aset karena adanya transfer masuk.

Ekuitas Akhir
Rp12.899.141.888,00

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing - masing sebesar Rp12.899.141.888,00 dan Rp7.342.378.542,00.

Ekuitas akhir pada periode 31 Desember 2021 senilai sebesar Rp12.899.141.888,00 adalah Ekuitas Awal senilai Rp7.342.378.542,00 ditambah kenaikan Ekuitas senilai Rp5.556.763.346,00.

Ekuitas Akhir pada periode 31 Desember 2021 sama dengan nilai ekuitas pada Laporan Neraca periode 31 Desember 2021.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Selama belum ditunjuknya pejabat Eselon I pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, maka Menteri Pertanian menunjuk pejabat sementara sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal. Pada awal tahun 2021 Plt. Inspektur Jenderal adalah Ir. Bambang, MM yang menjabat sampai dengan tanggal 20 Mei 2021. Dan berdasarkan Surat Perintah Menteri Pertanian Nomor 77/KP.410/M/05/2021, Menteri Pertanian menunjuk Dr. Ir. Suwandi, M.Si. sebagai Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian menggantikan Ir. Bambang, MM terhitung mulai tanggal 20 Mei 2021. Penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal berganti untuk ketiga kalinya pada tahun 2021 sesuai Surat Perintah Menteri Pertanian Nomor 090.2/KP.410/M/06/2021 tanggal 13 Juni 2021, yaitu Dr. Ir. Suwandi, M.Si digantikan oleh Dr.Ir.Kasdi Subagyo, M.Sc., disamping jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 33/TPA Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pertanian, memutuskan memberhentikan dengan hormat Justan Riduan Siahaan, Ak., M.Acc., CA. terhitung 1 Maret 2020 sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan mengangkat Dr. Jan Samuel Maringka, SH., MPH sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, yang terhitung mulai tanggal 9 Maret 2022.
3. Melalui surat Keputusan Menteri Pertanian RI No.329.1/KPTS/KU.010/A/5/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, menunjuk Suprodjo Wibowo, SE, M.Si, yang menjabat sebagai Sekretaris Itjentan sebagai pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada satker Itjentan.

4. Realisasi belanja untuk penanganan Pandemi COVID-19 senilai Rp2.939.219.546,00 atau 95,17 persen dari anggaran untuk COVID-19 senilai Rp3.088.398.000,00 hanya untuk operasional kantor dan kebutuhan pegawai Itjentan sehingga tidak mengakibatkan timbulnya transaksi pendapatan dan hibah, dan realisasi sesuai dengan akunnya sehingga tidak mengakibatkan adanya selisih antara realisasi belanja dan beban terhadap akun tersebut.
5. Pada laporan Ekstrakomtabel terdapat mutasi tambah dengan total senilai Rp1.720.000,00 yang merupakan transfer masuk dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berupa peralatan dan mesin lainnya pada ruangan Agriculture War Room (AWR) Itjentan.
6. Nilai persediaan Satker Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian setelah dilakukan update aplikasi mengalami perubahan, terdapat selisih nilai persediaan senilai Rp538.400,00. Nilai persediaan Unaudited (sebelum update aplikasi persediaan) senilai Rp618.829.274,00 dan setelah dilakukan update aplikasi menjadi senilai Rp619.367.674,00, sehingga nilai persediaan Audited 2021 adalah senilai Rp Rp619.367.674,00.

Hal tersebut dikarenakan adanya barang persediaan (1010301011.000004-isi hekmasine kecil) yang mengalami perubahan metode perhitungan FIFO pada Aplikasi Persediaan versi 21.1.0 dan dapat dijelaskan pada table berikut :

- Neraca persediaan sebelum update Aplikasi (Anaudited)

a.	Barang Konsumsi	Rp	618.829.274
b.	Bahan Untuk Pemeliharaan	Rp	-
c.	Persediaan Lainnya	Rp	-
	Total	Rp	618.829.274

- Neraca persediaan setelah update Aplikasi (Audited)

a.	Barang Konsumsi	Rp	619.367.674
b.	Bahan Untuk Pemeliharaan	Rp	-
c.	Persediaan Lainnya	Rp	-
	Total	Rp	619.367.674

7. Dari Total Aset Tetap Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Gabungan Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel) sebanyak 4.062 unit dengan total nilai sebesar Rp40.642.351.253,00, sebanyak 502 unit sebesar Rp6.045.025.287,00 telah ditetapkan status penggunaannya, dan sisanya sebanyak 3.560 unit yaitu sebesar Rp34.597.325.966,00 belum ditetapkan status penggunaannya.

F.3. REKENING PEMERINTAH

Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta keamanan dana APBN, Kementerian Keuangan melakukan modernisasi Rekening Pemerintah dengan diterbitkannya PMK 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara dan Lembaga, pada PMK tersebut yang disampaikan bahwa rekening pengeluaran pada satuan kerja dilakukan restrukturisasi dari rekening giro ke rekening virtual (virtual account). Maka pada tanggal 29 Desember 2020 telah dilakukan penutupan rekening Itjen Kementan dengan Nomor rekening 127-00-8700019-4. Dan pada tahun 2021 dilakukan pembukaan rekening baru dengan nama pemilik rekening **BPG 139 Itjen Kementan**, dan nomor rekening 8100122382471000.

Saldo Rekening Itjentan per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00. Data tersebut berdasarkan Rekening Koran per 31 Desember 2021. (Rekening Koran terlampir).

F.4. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK DAN ITJENTAN

Monitoring tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan Rekap Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi LHP BPK yang ditujukan kepada Itjentan (LHP sampai dengan tahun 2020) dari aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) terlampir.